

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁴

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

¹⁴ Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN), Cet. ke-1, h. 260.

¹⁵ Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, *loc.cit.*

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- f. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi.
- g. fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif.¹⁶

Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi

¹⁶ Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Ed. ke-1, Cet. ke-1, h. 681.

hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa.

B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.¹⁷

Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan.¹⁸

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar atau tidak kembali tepat waktu ataupun pembiayaan

¹⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 123.

¹⁸ Mahmuuddin, As, Haji, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta:Pustaka Sinar, 2002), Cet. ke-1, h. 1.

dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bagi hasil, pengambilan pokok pinjaman, atau dengan kata lain, definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam kualitas pembiayaan diragukan dalam macet (*non performing finance*).

Menurut ketentuan pasal 12 ayat (3) peraturan Bank Indonesia N0. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Mengenai masing-masing kualitas pembiayaan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar (Pass)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

2. Perhatian khusus (Special Mention)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c) Mutasi rekening relatif aktif.
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

- e) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (Substandard)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (Doubtful)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga.
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (Loss)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁹

Berkaitan dengan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah. Didunia perbankan syariah aspek penilaian pemberian pembiayaan dikenal dengan 6C + 1 S , yaitu:²⁰

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008). Cet. ke-4, h. 67.

²⁰ H.Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 88.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Constrains*

Batasan dan hambatan-hambatan atau resiko yang mungkin terjadi yang tidak mungkin pembiayaan di berikan. Misalnya, pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.

g. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN:

“Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

Selain dari aspek prinsip dari 6 C+1S di atas, dalam penilaian pengajuan pembiayaan atau kredit, masih ada konsep 7 P, yaitu:²¹

a. *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang memperhatikan dalam setiap pemberi pinjaman. Untuk itu pihak pemberi pembiayaan harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadianya tau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah

²¹ Thamrin Abdullah, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), h. 174-175.

laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah, *personality* hampir sama dengan character dari 6 C.

c. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian pembiayaan juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah pembiayaan akan digunakan untuk hal-hal positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus diawasi agar pembiayaan tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian pembiayaan.

d. *Prospect*

Menilai usaha nasabah dimasa mendatang apakah menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Harus diperhatikan apakah sumber pembayaran pembiayaan dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa pembiayaan yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan.

f. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian pembiayaan. *Profitability* diukur perperiode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian pembiayaan.

g. *Protection* (Perlindungan)

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang atau jaminan asuransi.

Konsep lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan adalah prinsip 3 R, yaitu:²²

a. *Return*

Adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan nasabah setelah di bantu dengan pembiayaan oleh bank.

b. *Repayment Capacity*,

Adalah menilai berapa lama perusahaan pemohon pembiayaan dapat membayar kembali pembiayaan, sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman bank, dan apakah pinjaman harus diangsur, dicicil atau dilunasi sekaligus di akhir periode.

c. *Risk Bearing Ability*

Adalah mempertimbangkan besarnya kemampuan untuk menanggung risiko yang mungkin timbul jika pembiayaan menjadi masalah. Apakah resiko perusahaan debitor kecil atau besar. Kemampuan perusahaan menghadapi resiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usahanya, dan mnajemen perusahaan yang bersangkutan.

²² Ismail, *op,cit.*, h. 116.

C. Prosedur Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, perlu adanya prosedur dan perjanjian antara pihak bank (shahibul mall) dengan pihak nasabah. Perjanjian pembiayaan pada Bank Islam pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu (1) Bank sebagai pemberi pembiayaan, (2) nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, (3) objek yang ditujununtuk dibiayai, dan (4) jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Berdasarkan empat hal tersebut, maka bank syariah selanjutnya membuat rencana pembiayaan. Pembuatan rencana pembiayaan sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh oleh bank syariah yang bersangkutan.

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan sebagai berikut:²³

1. Pengajuan berkas-berkas. Berkas-berkas yang dibutuhkan berisi:
 - a. Pengajuan proposal berisi: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan pembiayaan serta jaminan pembiayaan.
 - b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi: akte notaris, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP (nomor pokok wajib pajak), neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, serta fotocopy sertifikat jaminan.
 - c. Penilaian dari neraca dan laporan rugi laba dengan menggunakan rasio-rasio.

²³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, op.cit.*, h. 143-147.

2. Penyelidikan berkas jaminan

Tujuan adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan.

3. Wawancara awal

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

4. On the spot

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara.

6. Keputusan pembiayaan

Keputusan pembiayaan adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak.

7. Penandatanganan akad pembiayaan/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan pembiayaan, maka sebelum pembiayaan itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank bersangkutan.

9. Penyaluran dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan pembiayaan.

D. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat pembiayaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*.
- b. Pembiayaan Konsumen Akad *IMBT*
- c. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*.

- d. Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*.
- e. Pembiayaan Konsumen Akad *Qard + Ijarah*.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi kedalam tiga hal berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan untuk peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Secara umum, pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.²⁴

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam:

- a. PMK *Mudharabah*
- b. PMK *Istishna'*
- c. PMK *Salam*
- d. PMK *Murabahah*
- e. PMK *Ijarah*

²⁴ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) , Ed. ke-4, Cet. ke-8, h. 234.

2. Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk.²⁵

- a. Pendirian proyek baru, yaitu pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
- b. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan yang baru.
- c. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya baik/tinggi.
- d. Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
- e. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari satu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

²⁵ *Ibid*, h. 237-238.

3. Pembiayaan multi guna

Yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pendidikan, pernikahan, pembelian peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

E. Fungsi Pembiayaan

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain dari tujuan diatas, dalam praktinya tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan.

2. Membantu usaha nasabah

Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah Penerimaan pajak, Membuka kesempatan kerja, Meningkatkan jumlah barang dan jasa, Menghemat dan Meningkatkan devisa Negara.

Disamping memiliki tujuan, pembiayaan juga memiliki fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang

Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.

2. Meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainya.

4. Meningkatkan peredaran barang

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya pembiayaan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan,

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan pemberi pembiayaan.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah

Dalam menjalankan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan seperti bank syariah, tentunya perlu diperhatikan dengan cermat oleh bank bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan itu dibuat dan dijalankan, karena apabila tidak berjalan sesuai dengan prosedur, akan berakibat negatif, dan akan menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan. Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah memiliki analisis-analisis penilaian sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 menjelaskan bahwa bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian dalam penyaluran dana (pemberian pembiayaan) yaitu dengan menilai terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal

(*capital*), agunan/jaminan (*collateral*) serta prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.²⁶

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:²⁷

1. Faktor Intern Bank

- a. Analisis tidak tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan debitur.

²⁶ Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. ke-2. h. 68-69.

²⁷ Ismail, *op,cit.*, h. 123-125.

2. Faktor Eksteren Bank

I. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

II. Unsur ketidaksengajaan

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak membayar angsuran.
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

G. Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

Penyelamatan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian pembiayaan tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk penyelesaian pembiayaan itu. Penyelesaian pembiayaan melalui tahap ini disebut penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan ini diperlukan syarat utama yaitu adanya kemauan dan etika baik kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian pembiayaan melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.²⁸

Sedangkan yang dimaksud penyelesaian adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan dan Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁸ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Jakarta:Alfabeta, 2003), Cet. ke-1, h. 266.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:²⁹

1. *Rescheduling*

Yaitu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan penurunan jumlah yang harus diangsur oleh debitur.

2. *Reconditioning*

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, penurunan margin dan pembebasan margin.

3. *Restructuring*

Yaitu penambahan modal kepada nasabah potensial yang tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank dikarenakan unsur ketidak sengaja namun memiliki prospek usaha yang bagus menurut pihak bank.

4. *Combination*

Yaitu kombinasi antara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

5. *Penyitaan jaminan*

yaitu jalan terakhir yang dilakukan pihak bank apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah benar-benar tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.

²⁹ Ismail, *op,cit.*, h. 125-129.

H. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Ekonomi Islam

Menurut Ekonomi Islam pembiayaan bermasalah dikenal sebagai pembiayaan bermasalah dimana maksud dan tujuannya sama dengan kredit bermasalah yang ada dalam Ekonomi Konvensional. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atau *term of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan dan diperlukan tindakan yuridis. Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan risiko dan menjadi faktor kerugian yang mempengaruhi kesehatan bank.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dalam Ekonomi Islam juga sama dengan Ekonomi Konvensional, seperti:

- a. Kurangnya informasi yang dipakai waktu analisis pembiayaan.
- b. Perubahan kondisi ekonomi tidak terantisipasi.
- c. Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan/bidang usaha.
- d. Ketidakjujuran nasabah atas informasi kegiatan usaha dan tidak ada etika baik nasabah.
- e. Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan.³⁰

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam* menerangkan tentang langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap

³⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 200), Cet. ke-1, h. 476-477.

saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.³¹

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Surat AL-Baqarah Ayat 280 dan

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui".

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَجَرَّةٍ حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 303-304.

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ
بَعْضُكُمْ بِعَضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setuju menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.(QS. Al-Baqarah:282)

Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya,

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah senantiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).